

Memperkokoh Peran Kementerian Keuangandalam Mendorong Aksi Iklim



Pesan penting untuk Menteri Keuangan dan Pembuat Kebijakan

- **Kementerian Keuangan memiliki mekanisme penting** untuk mempercepat aksi iklim guna mencapai tujuan Perjanjian Paris dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, inklusif, dan tahan uji, namun mekanisme ini belum digunakan secara maksimal.
- **Aksi iklim yang tegas dapat membantu Kementerian Keuangan mencapai tujuan utamanya**, yaitu stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan, dan pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab. Manfaatnya termasuk memitigasi peningkatan risiko dengan dampak ekonomi makro, termasuk guncangan ekonomi dan anggaran, serta meningkatnya biaya modal. Selain itu, meningkatkan ketahanan ekonomi dan keuangan, menciptakan peluang pertumbuhan dan pembangunan yang lebih besar, termasuk lapangan kerja dan investasi, serta menyediakan energi dan pangan yang bersih, aman, dan terjangkau.
- **Kementerian Keuangan dapat memanfaatkan kerangka waktu untuk mengintegrasikan aksi iklim** ke dalam fungsi utama mereka seperti menyusun strategi ekonomi, kebijakan fiskal dan keuangan. Hal ini akan membutuhkan perubahan luas untuk meningkatkan tata kelola dan kepemimpinan, koordinasi, serta kemampuan individu dan analisis.
- **Menteri Keuangan berperan penting dalam mendukung dan berkontribusi atas aksi iklim** yang dilakukan oleh entitas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Agar para Menteri Keuangan dapat memanfaatkan sumber daya secara maksimal, peran mereka dalam mendorong aksi iklim dapat diperkuat dan diakui melalui mandat dan pengaturan tata kelola terkait iklim.
- **Kementerian Keuangan memiliki keahlian yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang kuat yang dibutuhkan saat ini.** Beberapa di antaranya telah menunjukkan kepemimpinan dan kemajuan yang luar biasa. Namun, ada kebutuhan mendesak untuk membangun kemajuan ini melalui langkah-langkah yang tegas dan komprehensif. Laporan singkat ini menguraikan kerangka kerja yang dapat membantu memandu proses ini.
- **Penerapan Prinsip-prinsip Helsinki sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan aksi-aksi prioritas.** Untuk itu, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim telah dibentuk untuk membantu para anggotanya dalam mencapai tujuan ini.

Ringkasan ini menyampaikan laporan dan panduan yang mendorong aksi iklim yang diambil oleh Kementerian Keuangan, serta menjabarkan kerangka kerja untuk mengintegrasikan pertimbangan iklim ke dalam tugas dan keahlian utama mereka, dan menetapkan bidang-bidang yang akan diberikan tindakan prioritas. Panduan ini disusun oleh hampir 30 Kementerian Keuangan, lebih dari 30 ahli dan mitra Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim, serta 40 pengajuan konsultasi dari organisasi swasta dan non-pemerintah. Panduan ini menawarkan berbagai opsi untuk membantu negara-negara meningkatkan fungsi dan kemampuan inti mereka dalam mengatasi perubahan iklim berdasarkan kondisi masing-masing negara. Panduan ini akan diperbarui secara berkala agar tetap relevan.

Panduan lengkap dan ringkasan laporan akan tersedia mulai Juni 2023 di <http://www.financeministersforclimate.org/>

1. Mengapa peran Kementerian Keuangan penting untuk aksi iklim dan transformasi ekonomi

Pemerintah di seluruh dunia sedang mengalami serangkaian krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti krisis ekonomi dengan pertumbuhan yang rendah, meningkatnya utang dan kesulitan pemulihan COVID-19; krisis energi dan biaya hidup; dan krisis iklim, yang ditandai dengan meningkatnya bahaya lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan, panas yang ekstrem, kekeringan, dan menurunnya keanekaragaman hayati serta kerusakan alam yang makin meningkat dalam hal frekuensi, intensitas, dan biaya. Krisis-krisis ini saling terkait dan harus ditangani secara bersamaan.

Para pemimpin di sektor publik dan swasta harus menunjukkan pemikiran visioner untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan membangun ekonomi yang tahan terhadap perubahan iklim dan bebas emisi karbon. Untuk itu, diperlukan dekarbonisasi di semua sektor ekonomi pada tahun 2050 melalui cara yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, meningkatkan kemampuan adaptasi dan perlindungan sumber daya alam untuk menciptakan masa depan yang berbasis energi bersih, aman, dan terjangkau, kota dan masyarakat di mana mereka bisa bergerak dan bernapas dengan mudah, pertanian yang tangguh dan produktif, serta industri dan lapangan kerja yang ramah lingkungan dan dinamis. Realisasi ekonomi masa depan ini berada dalam genggaman para pemimpin saat ini.

Kementerian Keuangan berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi ini sehingga tanpa keterlibatan mereka aksi iklim tidak mungkin berhasil. Dalam posisinya, badan ini melakukan koordinasi strategi ekonomi dan kebijakan fiskal, mengawasi regulasi sistem keuangan, dan secara kolektif, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan lebih dari US\$30 triliun pengeluaran pemerintah, yang mewakili lebih dari sepertiga PDB global. Sebagai Pemegang saham di badan usaha milik negara, bank pembangunan, dan sistem multilateral, mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lembaga-lembaga ini. Selain itu, mereka memegang kunci untuk membuka investasi global yang ditujukan untuk memerangi perubahan iklim, yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan pada tingkat di atas tingkat sebelum COVID-19, yaitu setidaknya 2% dari PDB di seluruh dunia dan mendekati 4-5% di pasar negara berkembang dan negara berkembang kecuali Tiongkok.

Para Menteri Keuangan berperan penting dalam mendukung dan mempercepat upaya-upaya yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah dan entitas swasta lainnya. Selain harus proaktif dalam bidang tanggung jawab mereka, seperti menerapkan penetapan harga karbon, kebijakan subsidi, dan insentif fiskal untuk mereformasi sistem perpajakan, mereka juga harus secara aktif berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Ekonomi, Energi, Pertanian, Transportasi, Perencanaan, Kesehatan, dan badan-badan lain untuk mendorong investasi berkelanjutan dan mengambil tindakan. Mereka juga perlu memimpin atau berbagi tanggung jawab di berbagai bidang seperti mengembangkan strategi iklim dan industri nasional, merancang program dukungan untuk sektor-sektor baru, mempromosikan keberlanjutan di sektor keuangan dan bisnis, menetapkan batas-batas kewenangan bank pembangunan, sovereign wealth fund, dan badan usaha milik negara, serta memastikan bahwa sistem keuangan global berjalan dengan baik.

Menerapkan aksi iklim sangat penting untuk mencapai prioritas utama Menteri Keuangan dalam hal stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan, dan pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab, dan akan memberikan setidaknya empat manfaat utama. Pertama, aksi iklim yang dirancang dengan baik akan membantu mencegah peningkatan risiko dengan konsekuensi makro yang parah, termasuk guncangan ekonomi dan anggaran dan meningkatnya biaya modal akibat meningkatnya insiden bahaya iklim. Kedua, hal ini dapat mendorong peluang pertumbuhan dan pembangunan yang signifikan, melalui penghematan biaya, lapangan kerja baru, serta menarik modal dan talenta baru. Ketiga, berinvestasi dalam ketahanan akan menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, terutama bagi anggota masyarakat yang paling rentan. Keempat, peralihan yang cepat ke energi terbarukan akan membantu para Menteri Keuangan untuk menyediakan energi yang bersih, aman, dan terjangkau bagi semua orang serta memerangi inflasi. Manfaat dan peluang ini ditambah dengan biaya dan risiko yang dapat dihindari berarti bahwa aksi iklim dapat membantu para Menteri Keuangan untuk memanfaatkan kisah pembangunan dan pertumbuhan di abad ke-21. Dan manfaatnya akan tumbuh dengan cepat dan saling menguatkan satu sama lain, karena solusi rendah karbon menjadi makin kompetitif di sektor-sektor yang menyumbang hampir tiga perempat emisi pada tahun 2030.

Kementerian Keuangan memiliki pengalaman untuk menjadi pemimpin nasional dan global yang dibutuhkan saat ini. Peran mereka dalam menanggapi pandemi COVID-19, Krisis Keuangan Global 2009, serta mendorong transformasi industri menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi pemimpin yang mudah beradaptasi dan inovatif, dapat mengatasi tantangan dan melindungi serta mendukung warga negara dan pelaku bisnis. Mereka yang dapat menerapkan kualitas-kualitas ini sebagai manajer krisis dan pemimpin ekonomi dalam menghadapi krisis iklim akan memimpin transisi menuju masa depan yang lebih kuat dan berkembang.

Kementerian Keuangan makin terlibat dan bertanggung jawab dalam transisi menuju ekonomi nol karbon dan berketahanan iklim. Kementerian Keuangan dan Ekonomi Rwanda, misalnya, telah menjadi yang terdepan dalam Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) negara tersebut dan telah mendapatkan hampir 1,5 miliar dolar AS dalam pendanaan iklim. Demikian pula, Kementerian Keuangan Jamaika telah membuat rencana pembiayaan risiko bencana tingkat atas, sementara Kementerian Keuangan Uruguay telah memberikan insentif fiskal untuk mendukung transisi negara tersebut menuju pembangkit listrik terbarukan. Departemen Keuangan Irlandia telah menerapkan skema penetapan harga karbon yang memanfaatkan pendapatan untuk mendukung transisi yang adil, dan Denmark telah merevisi mandat Kementerian Keuangannya untuk mendorong aksi iklim yang komprehensif di seluruh sektor ekonomi. Masih banyak contoh inspiratif lainnya yang disampaikan dalam laporan lengkap dan rangkuman Lampiran online.

Terlepas dari ambisi yang telah ditetapkan dalam strategi iklim nasional, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara tujuan-tujuan tersebut dengan sumber daya dan kebijakan yang diterapkan untuk mencapainya. Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam mendorong aksi iklim, tetapi banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hanya seperempat dari anggota Koalisi Menteri Keuangan yang secara aktif terlibat dalam semua aspek pengembangan dan pelaksanaan NDC. Penganggaran hijau hanya dipraktikkan oleh 14 dari 35 negara OECD, dan hanya sedikit Kementerian Keuangan yang memiliki strategi iklim yang spesifik. Selain itu, hanya sekitar \$650 miliar dari \$4 triliun investasi tahunan yang dibutuhkan untuk mencapai net zero pada tahun 2050 yang diinvestasikan pada tahun 2019. Sementara itu, pemerintah negara-negara G20 terus memberikan sekitar \$600 miliar per tahun dalam bentuk subsidi bahan bakar fosil, dan inisiatif penetapan harga karbon hanya mencakup kurang dari seperempat emisi global.

Keterlibatan Kementerian Keuangan dalam agenda iklim terhalang oleh berbagai hambatan. Beberapa Kementerian Keuangan mungkin tidak melihat aksi iklim sebagai peluang unik untuk pertumbuhan dan investasi jangka panjang, atau sebagai strategi untuk memitigasi risiko, melainkan sebagai biaya jangka pendek yang perlu dikelola. Demikian pula, mereka mungkin tidak melihat krisis energi saat ini sebagai peluang untuk segera beralih ke energi rendah karbon, atau menjajaki opsi-opsi untuk mendiversifikasi basis pajak, atau untuk menghadapi penghindaran risiko terhadap komitmen pengeluaran biaya baru. Selain itu, mereka mungkin enggan mempertanyakan asumsi bahwa kurangnya ruang fiskal merupakan hambatan yang tidak dapat diatasi untuk mengambil tindakan. Persepsi ini diperkuat oleh keterbatasan kapasitas dan keyakinan bahwa perubahan iklim adalah masalah lingkungan yang kecil dan bukan masalah ekonomi yang mendasar.

Meskipun Kementerian Keuangan tidak dapat mengatasi semua tantangan ini sendiri, lebih dari 80 anggota Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim telah mengakui bahwa perubahan iklim menimbulkan risiko yang nyata bagi perekonomian, dan bahwa kementerian mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong aksi iklim. Melalui upaya kolektif dan dukungan Prinsip-prinsip Helsinki, mereka mendorong peningkatan pengakuan dan keterlibatan Kementerian Keuangan dalam mengatasi perubahan iklim.

2. Kerangka kerja aksi iklim di Kementerian Keuangan

Untuk meningkatkan keterlibatan, Kementerian Keuangan harus mencari cara untuk mengintegrasikan aksi iklim ke dalam fungsi utamanya dan meningkatkan kapasitas mereka untuk bertindak. Dengan demikian, mereka dapat membantu memastikan bahwa aksi iklim sejalan dengan kebijakan ekonomi yang baik.

Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan pertimbangan iklim ke dalam **tiga fungsi utama mereka:**

1. **Strategi dan visi ekonomi:** meningkatkan tanggung jawab mereka dalam mengawasi atau berkontribusi pada strategi pembangunan nasional, rencana sektoral, dan perencanaan

penanaman modal yang dapat melakukan dengan berpartisipasi aktif dalam penyusunan strategi iklim nasional, mengintegrasikan praktik-praktik ramah lingkungan ke dalam pembangunan nasional dan rencana sektoral, membentuk strategi industri dan inovasi, serta berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk mengevaluasi persyaratan investasi dalam masa transisi.

2. **Kebijakan fiskal dan manajemen anggaran:** menggunakan tanggung jawab utamanya dalam hal kebijakan fiskal, perpajakan, serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk menciptakan kerangka kerja perpajakan karbon dan menerapkan bentuk baru perpajakan lingkungan, menghapuskan subsidi bahan bakar fosil, memperkenalkan insentif fiskal untuk sektor-sektor ramah lingkungan, mereformasi kerangka kerja pengeluaran multi-tahunan dan anggaran tahunan, serta mengadopsi strategi investasi dan pengadaan publik yang ramah lingkungan. Sangatlah penting untuk memperkenalkan sistem pajak nol karbon dan mengelola kewajiban kontingensi secara efektif. Keterlibatan Kementerian Keuangan dalam proses perumusan anggaran memberikan peluang penting untuk mendorong aksi iklim dan investasi.
3. **Kebijakan dan peraturan keuangan serta pengawasan sistem keuangan:** dengan memanfaatkan tugas utama mereka untuk mengawasi bank dan perusahaan milik negara, sovereign wealth fund, lembaga keuangan, dan pasar utang, serta berinteraksi dengan bank sentral, pemilik saham, lembaga keuangan internasional (LKI) dan bank pembangunan multilateral (MDB) untuk mendorong keberlanjutan di seluruh sistem keuangan, memperkuat ketahanan dan stabilitas keuangan, dan mendorong pembiayaan untuk investasi berkelanjutan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan bank sentral dapat digunakan untuk membangun kerangka kerja untuk obligasi hijau, memacu investasi modal swasta, meningkatkan adaptasi dan pembiayaan dan asuransi risiko bencana, serta memajukan pendanaan iklim internasional.

Kementerian Keuangan harus mengembangkan kapasitas untuk bertindak guna memperkuat fungsi-fungsi utama ini. **Ada tiga kemampuan yang sangat penting:**

1. **Kemampuan kepemimpinan:** memperkuat jajaran pemimpin aksi iklim di tingkat politik dan pejabat, memperkuat visi, misi, dan mandat Kementerian Keuangan untuk mendorong aksi iklim, serta menciptakan tanggung jawab dan struktur organisasi yang jelas untuk kepemimpinan iklim.
2. **Kemampuan koordinasi:** mendorong kolaborasi yang efektif di seluruh pemerintahan dan dengan sektor swasta, masyarakat sipil dan lembaga keuangan internasional, serta platform dan proses multilateral yang didukung oleh strategi yang efektif untuk konsultasi dan komunikasi.
3. **Kemampuan sumber daya manusia dan analitis:** memastikan adanya sumber daya staf khusus, meningkatkan keahlian mereka dalam kebijakan iklim, dan memperbarui alat dan metode analisis untuk pengumpulan data dan pengambilan keputusan ekonomi.

Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam memimpin transisi yang adil untuk memastikan dukungan publik dan memfasilitasi rancangan kebijakan yang efektif. Hal ini mencakup pendistribusian manfaat transisi secara adil dan luas, serta memberikan dukungan yang ditargetkan kepada individu, bisnis, organisasi, dan masyarakat yang mungkin terkena dampak negatif dari transisi.

Kementerian Keuangan harus mempertimbangkan interaksi antara berbagai instrumen kebijakan iklim yang berbeda di tiga bidang fungsional dan membuat langkah-langkah yang saling melengkapi untuk memperkuat satu sama lain. Mengenali sinergi antara fungsi dan kemampuan inti akan sangat penting untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.



Catatan: Prinsip-prinsip Helsinki (HP) dapat dilihat di www.financeministersforclimate.org

Penjelasan terperinci Kerangka Kerja ini dapat dilihat pada laporan lengkap yang menyertai laporan singkat ini, yang bertujuan untuk membantu Kementerian Keuangan dalam meningkatkan fungsi dan kemampuan utama mereka. Laporan ini menjelaskan peran penting mereka di setiap bidang, tantangan yang dihadapi dan strategi untuk mengatasinya, serta contoh-contoh nyata yang menginspirasi, dan peluang untuk bertindak.

3. Prioritas tindakan Kementerian Keuangan

Kami telah mengidentifikasi 15 strategi yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan di seluruh dunia untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Helsinki serta menunjukkan kesiapan ekonomi dunia dalam menerapkan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Membangun kemampuan dan kapasitas untuk bertindak

Dengan melakukan reformasi dan meningkatkan kemampuan internal, Kementerian Keuangan dapat mempercepat dan memperluas upaya mereka dalam mendorong tindakan iklim di berbagai fungsi utama seperti yang telah diidentifikasi di atas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

- Kementerian Keuangan memiliki strategi aksi iklim khusus dan mandat yang diperkuat.** Rencana yang berlaku di seluruh organisasi dapat membantu Kementerian Keuangan dalam menetapkan tujuan dan prioritas konkret serta mengumpulkan sumber daya internal untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mendorong aksi iklim baik di internal maupun di seluruh pemerintahan. Mandat eksplisit untuk mendorong aksi iklim dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, program pemerintah secara keseluruhan, atau proses pengembangan strategi organisasi.
- Meningkatkan kapasitas khusus terkait aksi iklim.** Hal ini bisa dilakukan dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas di tingkat senior untuk mendorong aksi iklim, berinvestasi dalam proses kolaborasi baru, dan menunjuk staf khusus sebagai narahubung isu iklim. Apabila sumber daya memadai, maka dapat dibentuk unit khusus yang bertanggung jawab atas perubahan iklim dengan cara memindahkan staf yang sudah ada ke unit tersebut dan merekrut tenaga ahli yang baru.
- Keterlibatan aktif dalam upaya mengkoordinasikan lembaga dan pemangku kepentingan.** Kementerian Keuangan memegang posisi strategis dalam mendorong pendekatan yang holistik antara pemerintah dan sektor ekonomi terkait kebijakan iklim. Setidaknya, mereka harus mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan kolaborasi dan partisipasi dari Menteri dan Kementerian Keuangan dalam mekanisme koordinasi antarkementerian yang telah ada serta menyediakan sumber daya yang sesuai. Mereka juga harus membantu membangun

hubungan yang kuat dan platform multi-pemangku kepentingan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

4. **Berinvestasi dalam keterampilan dan keahlian.** Seluruh staf perlu memiliki kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu iklim, sementara staf spesialis membutuhkan keahlian di bidang ekonomi iklim, manajemen risiko, kebijakan fiskal hijau dan keuangan hijau, serta keahlian di bidang sektoral tertentu. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan internal, rekrutmen, jaringan peer-to-peer, melibatkan akademisi dan penyedia pengetahuan lainnya, serta memanfaatkan keahlian dari lembaga lain. Kementerian Keuangan bisa memulai dengan menilai kesenjangan keahlian terkait isu-isu iklim dan membuat rencana pelatihan dan perekrutan yang sesuai.
5. **Memperbaiki perangkat ekonomi, data dan pendekatan pengambilan keputusan.** Diperlukan perangkat dan data baru untuk melakukan penilaian yang lebih baik terhadap biaya, manfaat, dan dampak fiskal dari jalur dan investasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis nol karbon. Penting untuk mengatasi kekurangan dari keseimbangan umum tradisional dan analisis biaya-manfaat dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dapat menangkap dampak iklim yang non-linear, perubahan yang non-marginal dalam perekonomian, dan analisis skenario penggunaan. Selain itu, diperlukan pula pemanfaatan ilmu pengetahuan data terbaru dan penjelajahan indikator baru untuk kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan utama

Kementerian Keuangan harus memfokuskan diri pada bidang kebijakan yang memiliki dampak langsung dan signifikan sesuai dengan tanggung jawab utama mereka. Kebijakan tersebut meliputi:

6. **Memperkenalkan kebijakan fiskal yang mengubah insentif ekonomi makro terkait aksi iklim.** Agar dapat berhasil, skema penetapan harga karbon dan reformasi subsidi harus diimplementasikan, dilengkapi dengan insentif fiskal dan reformasi peraturan lainnya untuk mengubah sistem ekonomi utama yang diperlukan dalam transisi menuju nol karbon dan berketahanan iklim. Kementerian Keuangan harus turut berpartisipasi dalam memastikan konsistensi paket kebijakan dan memanfaatkan interaksi yang kuat antara instrumen penetapan harga dan instrumen lainnya, tanpa adanya kontradiksi.
7. **Memanfaatkan anggaran dan manajemen keuangan publik untuk mendorong perubahan di semua sektor ekonomi.** Dengan menyatakannya secara jelas dalam anggaran dan kerangka pengeluaran jangka menengah bahwa iklim adalah prioritas nasional, maka hal ini akan menjadi titik awal yang penting untuk mendorong aksi iklim di seluruh badan-badan pemerintah dan mengurangi risiko serta biaya modal bagi sektor swasta. Langkah ini harus diterapkan dengan memperkuat proses manajemen keuangan publik yang sudah ada, sehingga aksi iklim dapat menjadi prioritas utama di seluruh siklus anggaran dan anggaran kementerian yang terperinci dapat sepenuhnya mencerminkan prioritas iklim pemerintah. Selain itu, juga harus dilakukan penyesuaian manajemen investasi publik dan praktik pengadaan barang dan jasa dengan tujuan iklim.
8. **Merancang kembali sistem pajak guna mencapai netralitas karbon dan ketahanan iklim.** Kementerian Keuangan perlu melakukan tinjauan rinci terhadap seluruh sistem perpajakan sebagai landasan untuk melakukan reformasi. Proses ini dapat meliputi peninjauan bentuk baru perpajakan lingkungan, pajak kendaraan bermotor, tarif jalan, pajak properti dan tanah, serta reformasi perpajakan secara umum. Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus memahami dampak risiko iklim terhadap perekonomian dan keuangan publik, serta mengidentifikasi dan merencanakan kewajiban kontingensi yang mungkin muncul dalam kondisi yang diketahui maupun tidak diketahui.
9. **Menggalang, mengarahkan, dan menggabungkan pendanaan untuk investasi dengan skala dan kecepatan luar biasa.** Kementerian Keuangan harus mempertimbangkan penggunaan pendapatan domestik untuk mendukung investasi nasional selama masa transisi, dengan memperluas basis pajak, menggunakan obligasi hijau yang bertanggung jawab untuk investasi, serta meningkatkan keuangan sub-sovereign. Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus merancang peta jalan keuangan berkelanjutan yang komprehensif, yang meliputi strategi untuk mewujudkan sistem keuangan yang ramah lingkungan, serta memastikan aliran keuangan yang sejalan dengan Perjanjian Paris dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal. Proses ini juga meliputi penggunaan mekanisme pengungkapan dan rencana transisi, serta penyediaan pembiayaan dan asuransi risiko bencana yang mencakup

seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, platform keuangan campuran dan platform negara harus dimanfaatkan untuk membantu mengumpulkan dana investasi.

- 10. Mengoptimalkan pendanaan iklim internasional.** Di negara-negara yang relevan, Kementerian Keuangan perlu berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga-lembaga pembangunan untuk mengembangkan strategi khusus dalam memperoleh pendanaan iklim internasional. Semua Kementerian Keuangan harus mempromosikan peningkatan dukungan untuk aksi iklim bank-bank pembangunan regional dan multilateral dengan membentuk koalisi guna meningkatkan jumlah dana yang diterima dan menurunkan biaya modal. Para pemangku kepentingan dan negara-negara lain harus mendorong adanya peningkatan pemberian pendanaan iklim internasional, khususnya pendanaan lunak dan untuk adaptasi.

Bekerja dengan badan-badan lain

Langkah ini harus disertai dengan dibangunnya kemitraan yang kuat dengan badan pemerintahan yang lain dan para pemangku kepentingan dari berbagai bidang kebijakan yang lebih luas. Prioritas bagi kepemimpinan dan keterlibatan proaktif dari Kementerian Keuangan termasuk:

- 11. Menempatkan aksi iklim sebagai prioritas dalam pertumbuhan nasional dan strategi pembangunan.** Sangat penting bahwa upaya iklim dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dipertimbangkan bersama-sama. Kementerian Keuangan perlu berkolaborasi dengan kementerian terkait lainnya dalam memfasilitasi integrasi aksi iklim dalam rencana pembangunan nasional serta strategi sektor yang terkait dengan energi, transportasi, perkotaan, penggunaan lahan, industri, dan air. Hal ini juga harus mempertimbangkan perkembangan industri yang makin pesat di abad ke-21 serta strategi inovatif dalam pengelolaan dan investasi untuk beralih menuju net zero.
- 12. Keterlibatan aktif dalam strategi iklim nasional.** Dalam hal ini, diperlukan kepemimpinan proaktif dari Kementerian Keuangan untuk mengembangkan dan menerapkan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional, Strategi Jangka Panjang, serta Rencana Adaptasi Nasional. Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus memberikan dukungan kepada badan-badan lainnya dalam mengembangkan strategi yang sepenuhnya didanai untuk menjadi dasar dalam menarik investasi dari sektor publik dan swasta.
- 13. Mengembangkan strategi investasi yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan.** Kementerian Keuangan dapat bekerja dengan badan-badan lain serta pemangku kepentingan sektor swasta untuk menilai kebutuhan investasi perekonomian secara umum dan spesifik per sektor, mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengatasi hambatan investasi, menentukan pembagian pembiayaan yang potensial, dan membangun mekanisme untuk menerjemahkan keputusan perencanaan investasi menjadi program dan alur proyek yang konkret, termasuk melalui perencanaan anggaran dan investasi modal publik.
- 14. Mendorong transformasi hijau dari BUMN, bank pembangunan nasional, dan sovereign wealth fund melalui kerja sama dengan bank sentral.** Kementerian Keuangan dapat memanfaatkan posisinya sebagai pengawas atau pemegang saham untuk mendorong praktik ramah lingkungan di BUMN, bank pembangunan nasional, dan sovereign wealth fund. Mereka perlu bekerja sama dengan gubernur bank sentral dalam merumuskan kembali kebijakan moneter serta menjaga stabilitas keuangan dengan tujuan mendorong aksi iklim dan menjajaki peluang koordinasi fiskal dan moneter, sekaligus menghindari pelanggaran atas independensi bank sentral.
- 15. Mengembangkan rencana dan kebijakan transisi yang adil.** Kementerian Keuangan dapat berkolaborasi dengan badan-badan lain untuk mengembangkan rencana transisi yang adil dan merata untuk semua sektor utama ekonomi, dengan mempertimbangkan dampak sosial positif dan negatif dari kebijakan iklim, serta memastikan bahwa semua warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari transisi tersebut. Perhatian khusus harus diberikan pada penciptaan lapangan kerja hijau baru, pelatihan ulang pekerja, dan revitalisasi area yang sedang beralih dari produksi bahan bakar fosil.

4. Langkah-langkah membuat kemajuan nyata

Setiap Kementerian Keuangan harus memprioritaskan dan mengurutkan tindakan yang mereka ambil. Karena setiap Kementerian Keuangan memiliki titik awal yang beragam dan terdapat perbedaan dalam hal kekuasaan, kemampuan, budaya, fleksibilitas, dan struktur ekonomi di daerah tempat mereka beroperasi, maka jalur dan prioritas reformasi tentu saja tidak sama di setiap negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan ini dengan akurat agar dapat menentukan strategi reformasi organisasi yang tepat. Dalam rangka membantu negara-negara mengatasi hambatan dan mencapai kemajuan yang lebih signifikan, laporan utama menyajikan contoh-contoh pertanyaan yang dapat digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai bahan refleksi dalam membantu menentukan prioritas. Selain itu, beberapa Kementerian Keuangan juga dapat mempertimbangkan ulasan kemampuan keseluruhan organisasi terkait dengan tujuan net zero dan ketahanan iklim.

Untuk menetapkan prioritas, Kementerian Keuangan harus membuat keputusan tentang sejumlah pertukaran di bidang makroekonomi dan kebijakan. Umumnya, para menteri dan pejabat senior memberikan perhatian yang sama terhadap politik, administrasi, dan kelayakan hukum. Pejabat dapat membantu Menteri dan pengambil keputusan dalam menentukan pertukaran dengan mengikuti beberapa prinsip, seperti memiliki pola pikir yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win) atau sinergis, tetap menjaga ambisi di tengah ketidakpastian, mempertimbangkan risiko bisnis seperti biasa (business-as-usual), merevisi asumsi yang sudah kedaluwarsa, dan berfokus pada hasil, bukan alternatif. Tentu saja, tidak semua tindakan terkait iklim dapat menghasilkan keuntungan untuk semua pihak - akan ada pertukaran yang benar-benar harus dilakukan untuk mengatasi berbagai sektor yang bersaing, dan seiring waktu, biaya untuk solusi rendah karbon saat ini mungkin lebih tinggi daripada alternatifnya. Selain itu, prioritas pengeluaran harian dapat lebih diutamakan daripada investasi dengan periode pengembalian yang lebih lama. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa ruang lingkup untuk mencapai keuntungan bersama sering kali lebih besar daripada yang dianggap secara umum, dan ada cara-cara efektif untuk membuat keputusan tentang pertukaran.

5. Pelaksanaan dukungan dari Koalisi Menteri Keuangan.

Koalisi Menteri Keuangan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada anggotanya dalam menerapkan tindakan dari panduan ini. Upaya yang akan dilakukan mencakup:

1. Program strategis yang melibatkan anggota dan non-anggota guna meningkatkan kesadaran dan pengakuan oleh Menteri Keuangan, kementerian terkait lainnya, serta masyarakat luas akan pentingnya peran mereka dalam mendorong tindakan konkret untuk memprioritaskan iklim dalam fungsi dan kemampuan utama mereka dengan cara yang efisien dan efektif.
2. Meningkatkan pelatihan dan program bantuan teknis bagi Kementerian Keuangan dengan memanfaatkan program yang disediakan atau dirancang oleh Mitra Lembaga Koalisi seperti Bank Dunia, IMF, World Resources Institute, Kemitraan NDC, Lembaga PBB, mitra pembangunan, dan akademisi.
3. Membentuk kemitraan dalam bidang pengetahuan dan riset yang terdiri dari pihak-pihak terkait guna memastikan Kementerian Keuangan dapat mengakses analisis dan riset berkualitas tinggi, dengan mengambil inspirasi dari jaringan dan praktik yang sudah ada.
4. Meningkatkan kesadaran dan dialog terkait implementasi panduan melalui penyelenggaraan lokakarya regional atau 'roadshow' di setiap negara, yang ditujukan untuk para pemimpin politik, Menteri Keuangan, tim dan staf manajemen senior, serta mitra-mitra terkait.
5. Menyenggarakan diskusi global atau regional dengan para pemangku kepentingan terkait wilayah kontestasi guna meningkatkan kesepakatan global mengenai pentingnya peran Kementerian Keuangan dalam mendorong tindakan iklim.
6. Menerima umpan balik dan berbagi pengalaman dengan para menteri mengenai cara mencapai kemajuan dalam memperkuat peran Kementerian Keuangan dan keterlibatannya di proses iklim global lewat Pertemuan Menteri di akhir 2023/awal 2024.

7. Meningkatkan keterlibatan Kementerian Keuangan di proses iklim nasional dan global menjelang COP28 tentang iklim dan COP16 tentang keanekaragaman hayati.

Hal yang penting adalah bagaimana Kementerian Keuangan dapat mengembangkan strategi pengintegrasian aksi iklim ke dalam operasi utama mereka, dengan memperhatikan bahwa upaya jangka pendek dan jangka panjang sangatlah penting. Pengembangan rencana tersebut akan sangat terbantu melalui kerja sama yang erat dengan Kementerian lain, badan-badan terkait, dan mitra. Saat ini, perlu adanya peningkatan upaya untuk menjalankan tindakan-tindakan prioritas. Kita tidak punya waktu lagi, dampak dari perubahan iklim makin besar, dan tindakan yang diambil dengan cepat akan menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Ringkasan ini merupakan hasil dari Prinsip Helsinki 2 yang diprakarsai oleh Finlandia dan Rwanda, dan telah diterbitkan pada bulan April 2023. Ringkasan ini disusun secara kolaboratif oleh Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim, dan dikoordinasikan oleh tim di Grantham Research Institute on Climate Change and Environment di London School of Economics and Political Science. Seluruh anggota Koalisi diberikan kesempatan untuk memberikan ulasan terhadap karya ini.

Catatan dan Referensi

¹ Kementerian Keuangan biasanya memantau pengeluaran pemerintah yang mencapai sekitar 30% dari PDB global, dengan total jumlah di atas \$100 triliun. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada *Public Expenditure and Inclusive Growth - A Survey* oleh Zouhar Y, Jellema J, Lustig N, dkk. (2021). IMF Working Paper No. 2021/083 dan database IMF World Economic Outlook.

² Songwe V, Stern N dan Bhattacharya A (2022) *Finance for climate action: Scaling up investment for climate and development*. London School of Economics and Political Science.

³ Systemiq (2020) *The Paris Effect. How the climate agreement is reshaping the global economy*.

⁴ Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (2020) *Ministries of Finance and Nationally Determined Contributions. Stepping Up for Climate Action*.

⁵ OECD (2021) *Government at a Glance*.

⁶ CPI (2022) *Global Landscape of Climate Finance: A Decade of Data*.

⁷ Bank Dunia (2022) *State and Trends of Carbon Pricing 2022*.

⁸ Songwe dkk. (2022), supra note 2.

Lampiran

Beberapa contoh praktik baik oleh Kementerian Keuangan (atau badan-badan yang setara dengannya) dalam hal fungsi-fungsi utama

Area Aksi	Contoh Negara
Fungsi 1: Mereformasi strategi ekonomi melalui perencanaan nasional dan strategi transisi (Prinsip Helsinki 1 dan 6)	
Strategi Jangka Panjang (Long-Term Strategies / LTS)	<ul style="list-style-type: none">• Kemenkeu Inggris meluncurkan <i>Net Zero Review</i>• Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Burkina Faso dilibatkan di seluruh tahapan proses LTS• Kementerian Keuangan, Perencanaan Strategis, Perencanaan & Pembangunan Nasional (Kementerian Ekonomi) Fiji memimpin pengembangan LTS• Kemenkeu Chili, Kosta Rika, dan Etiopia mendukung pengembangan LTS• LTS Makedonia Utara dan Kamboja menilai implikasi pada ekonomi dalam negeri
Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions / NDC)	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Keuangan dan Perencanaan Ekonomi (MINECOFIN) Rwanda memimpin revisi NDC• Kementerian Keuangan dan Perencanaan Ekonomi (MOFEP) Sudan menjadi titik fokus implementasi NDC• Kemenkeu Norwegia bertanggung jawab atas pengukuran ekonomi NDC• Kemenkeu Chili, Norwegia, dan Uruguay mendukung pengembangan NDC
Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plans / NAP)	<ul style="list-style-type: none">• Kementerian Ekonomi Fiji melakukan pembiayaan NAP• Kementerian Ekonomi, Keuangan dan Perencanaan Pembangunan (MOEFDP) Togo menelaraskan proses NAP dengan perencanaan anggaran nasional
Strategi pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Pembangunan Nasional dan Strategi Pertumbuhan Hijau, Kementerian Keuangan, Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi (MOFPED) Uganda• Kemenkeu Nigeria memimpin Perencanaan Pembangunan Nasional• Irlandia merevisi Rencana Pembangunan Nasionalnya• Kemenkeu Meksiko menelaraskan perencanaan nasional dengan Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan• Kemenkeu Perancis mengoordinasikan strategi dekarbonisasi sektoral• Bangladesh dan Maroko mengembangkan rencana dekarbonisasi sektor
Strategi industri dan inovasi	<ul style="list-style-type: none">• Strategi industrialisasi hijau Maroko• India meluncurkan program panel surya (fotovoltaik program)• UU Pengurangan Inflasi AS• Jepang dan Etiopia meluncurkan Strategi Pertumbuhan Hijau dengan elemen kebijakan industri
Strategi investasi dan penilaian kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">• MINECOFIN Rwanda mendorong aksi dan investasi iklim• Saint Kitts dan Nevis melakukan penilaian hambatan investasi sebagai bagian dari NDC• Rencana Energi dan Iklim Nasional Spanyol, dikembangkan bersama-sama dengan Kementerian Keuangannya• Kamboja dan Kosta Rika melakukan penilaian kebutuhan investasi jangka panjang• Kemenkeu Finlandia menjadi bagian dari kelompok kerja keuangan transisi hijau lintas kementerian
Alur dan prioritas proyek	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Investasi NDC Kiribati berisikan alur proyek• São Tomé dan Príncipe mengembangkan <i>roadmap</i> proyek• Indonesia, Kolombia, Inggris, dan Meksiko menetapkan lembaga untuk mempercepat investasi
Fungsi 2: Mereformasi kebijakan fiskal (Prinsip Helsinki 3 dan 4)	
Insentif ekonomi dan kebijakan fiskal	<ul style="list-style-type: none">• Kemenkeu Kanada, UE, Chili, Irlandia, dan Denmark memperkenalkan penetapan harga karbon• Kemenkeu Indonesia dan India mereformasi subsidi bahan bakar fosil

	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Swedia memperkenalkan instrumen kebijakan penghasil pemasukan • Kemenkeu Uruguay berperan dalam mendorong transformasi sektor energi di Uruguay • Kemenkeu Jerman, Etiopia, Islandia, dan Belgia memperkenalkan insentif pajak untuk kendaraan listrik dan pemasangannya
--	---

Area Aksi	Contoh Negara
Paket kebijakan cerdas	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Chili memperkenalkan Strategi Keuangan Hijau terintegrasi • Kosta Rika menyelaraskan pajak lingkungan yang berbeda-beda • Paket Cocok untuk 55 dari UE • Jerman, India, dan Inggris menggunakan paket kebijakan cerdas
Menjamin keuangan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Kosta Rika memimpin pengenalan reformasi pajak hijau • Swiss memperkenalkan biaya pengguna jalan (<i>road user charging</i>) • Beberapa negara bagian dan kota di AS memperkenalkan biaya pengguna jalan sebagai ganti dari pajak bahan bakar
Mengelola risiko fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Bahama mengidentifikasi peluang investasi infrastruktur iklim • Barbados memperkenalkan klausul risiko bencana ke dalam perjanjian pinjaman
Kerangka kerja pengeluaran dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Prancis mempersiapkan Anggaran Hijau • Kemenkeu Nepal menyertakan Anggaran Iklim • Kanada menerapkan Penilaian Lingkungan Strategis untuk kebijakan dan proposal program
Menghijaukan pengelolaan investasi publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Meksiko mengembangkan indikator keberlanjutan untuk investasi publik • Etiopia memiliki Pedoman pengelolaan investasi publik yang dikembangkan bersama-sama dengan Kemenkeu-nya • Chili memiliki metodologi penilaian risiko bencana pada proyek infrastruktur publiknya • Kosta Rika menganalisis risiko bencana di Sistem Investasi Publik Nasional
Pengadaan hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Kosta Rika memperkenalkan UU pengadaan publik hijau

Fungsi 3: Mereformasi kebijakan keuangan dan sistem keuangan untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memadukan keuangan (Prinsip Helsinki 5)

Perluasan basis pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Otoritas Pajak Rwanda di bawah Kemenkeu menerapkan reformasi pengumpulan pajak
Pembiayaan utang, termasuk melalui obligasi hijau dan obligasi tematis lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Polandia, Fiji, Italia, Prancis, dan Singapura menerbitkan obligasi hijau • Kemenkeu Chili dan Uruguay menerbitkan obligasi yang terkait dengan keberlanjutan kedaulatan • Kemenkeu Meksiko menerbitkan obligasi SDG, Seychelles meluncurkan obligasi biru dan Indonesia menerbitkan 'sukuk hijau' • Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa meluncurkan obligasi ketahanan iklim • EU menanggihkan aturan fiskal untuk merespons fiskal COVID-19 • Belize menandatangani pertukaran utang untuk iklim (<i>debt-for-climate swap</i>)
Keuangan sub-sovereign	<ul style="list-style-type: none"> • Menkeu Inggris dan Kota London menggunakan pembiayaan berbasis lahan • MOFPED Uganda meningkatkan administrasi dan pengumpulan pajak • Johannesburg dan Kota Meksiko menerbitkan obligasi hijau
Menghijaukan bank pembangunan nasional (NDB) dan bank investasi hijau (GIB)	<ul style="list-style-type: none"> • KfW Jerman, AFD Prancis, dan Bancoldex Kolombia menyediakan pembiayaan untuk proyek karbon-rendah, berketahanan iklim • Bank Investasi Eropa menerbitkan Peta Jalan Iklim • Kemenkeu Belanda menghijaukan asuransi kredit ekspor
Memanfaatkan sovereign wealth fund dan BUMN	<ul style="list-style-type: none"> • Norwegia menghijaukan Dana Pensiun Global Pemerintahnya dengan dukungan dari Kemenkeu

	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Italia mengamankan Kerangka Kerja Obligasi Hijau, Sosial, dan Keberlanjutan CDP • Kemenkeu Selandia Baru menerbitkan kerangka kerja investasi untuk Dana Pensiun
Area Aksi	Contoh Negara
Mereformasi aktivitas bank sentral	<ul style="list-style-type: none"> • Menkeu Inggris mengubah remitansi Komite Kebijakan Keuangan dan Moneter Bank Sentral Inggris • UE mempermasalahkan mandat Bank Sentral Eropa
Menghijaukan sektor keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen sektor keuangan rencana iklim nasional dan energi (NCEP) Belanda • Lembaga keuangan Prancis berkomitmen atas strategi keluar dari batu bara (<i>coal exit strategies</i>) dengan Menteri Ekonomi dan Keuangan • Indonesia meluncurkan taksonomi hijau • Luksemburg meluncurkan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan • Kemenkeu Meksiko meluncurkan Taksonomi Berkelanjutan • Polandia mengombinasikan pengembangan pasar modal dengan keuangan berkelanjutan
Inovasi model keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Indonesia merangkul bauran keuangan • UE meluncurkan Rencana Investasi Eksternal • Finlandia meluncurkan Bauran Keuangan untuk Program Iklim • Jerman dan Luksemburg meluncurkan inisiatif untuk menghimpun dana iklim
Peta jalan keuangan hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Jerman turut serta mengembangkan peta jalan keuangan berkelanjutan
Pembiayaan dan asuransi risiko bencana untuk semua	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Jamaika turut serta mengembangkan strategi pendanaan risiko bencana • Empat Negara Aliansi Pasifik meluncurkan obligasi bencana • Fasilitas Asuransi Risiko Bencana Karibia • Proses manajemen risiko bencana oleh Kemenkeu Meksiko
Memanfaatkan modal dari bank pembangunan multilateral (MDB) dan lembaga keuangan pembangunan (DFI)	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Pembangunan Brasil (BNDES) membiayai proyek pembangunan hijau • Nacional Financiera (NAFIN) Meksiko mendukung proyek pembiayaan iklim internasional • Rwanda Green Fund (FONERWA) sebagai kendaraan pembiayaan iklim
Mengakses pasar modal internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif Pasar Karbon Afrika yang diluncurkan di COP27 • Guyana, Peru, Nepal, dan Kamboja menerbitkan, atau bersiap menerbitkan kredit karbon
Platform negara	<ul style="list-style-type: none"> • Afrika Selatan meluncurkan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan Internasional (<i>International Just Energy Transition Partnership</i>)
Lintas sektoral: Transisi berkeadilan	
Memastikan transisi berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Irlandia menggunakan pemasukan dari pajak karbon untuk mendukung transisi berkeadilan • Gugus Tugas Transisi Berkeadilan Kanada memitigasi dampak sosial dari transisi • Perjanjian transisi berkeadilan Spanyol untuk wilayah yang terdampak iklim • UE meluncurkan mekanisme transisi berkeadilan

Catatan: Tidak semua inisiatif yang disebutkan memiliki keterlibatan Kemenkeu, namun mereka dapat menjadi contoh jenis-jenis strategi yang dapat dikembangkan atau didukung oleh Kemenkeu. Yang **dicetak tebal** menunjukkan adanya studi kasus terperinci yang disertakan di dalam laporan lengkap.

Contoh kepemimpinan iklim oleh Kementerian Keuangan (atau yang setara) untuk meningkatkan kemampuan utama

Area Aksi	Contoh Negara
Kemampuan 1: Kepemimpinan dan tata kelola (Prinsip Helsinki 2)	
Membenahi mandat Kemenkeu terkait perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu Denmark memperbarui pernyataan misinya • Irlandia, Bahama, Malaysia, Peru, dan Uruguay mengklarifikasi mandat Kemenkeu
Mengembangkan strategi internal Kemenkeu terkait perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Strategis Kemenkeu AS termasuk 'Operasi Kemenkeu Berkelanjutan' • Kemenkeu Irlandia, Selandia Baru, dan Finlandia mengintegrasikan iklim ke dalam strategi kementerian mereka • Chili dan Kemenkeu AS menerbitkan strategi iklim • Strategi iklim dan lingkungan yang baru dari Kemenkeu Finlandia
Meningkatkan tata kelola dan pengaturan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Ekonomi Fiji membuat Divisi Perubahan Iklim dan Kerja Sama Internasional • India membuat Unit Keuangan Perubahan Iklim di dalam Kemenkeu • Kemenkeu Denmark membuat Pusat Iklim, Ekonomi Hijau, dan UE • Kemenkeu Irlandia, India, Chili, Uganda, Peru, dan Inggris memiliki unit-unit khusus • Kemenkeu AS membuat Climate Hub
Kemampuan 2: Koordinasi dan kolaborasi (Prinsip Helsinki 2 dan 4)	
Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu AS, Uganda, Uruguay, dan Singapura terlibat dalam mekanisme koordinasi antar-badan • Peranan Kemenkeu Uganda dalam koordinasi respons iklim • Prancis membuat Sekretariat Umum untuk Perencanaan Ekologi • Kemenkeu Yunani, Uruguay, dan Mesir berkolaborasi dalam inisiatif-inisiatif strategis • Peranan Kemenkeu Denmark dalam koordinasi kebijakan iklim • Kemenkeu Irlandia, Prancis, dan Uruguay berkoordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal • Kemenkeu Chili membuat pertemuan meja bundar untuk pendanaan publik-swasta
Kemampuan 3: Kapasitas manusia, keahlian, dan pengambilan keputusan ekonomi (Prinsip Helsinki 2 dan 4)	
Peningkatan keterampilan dan keahlian	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi Eropa mendukung implementasi penganggaran hijau di antara anggota UE • Bank Pembangunan Inter-Amerika menyediakan dukungan bagi kebijakan fiskal hijau • Kemenkeu Denmark dan AS menyediakan pelatihan iklim • Dewan Menteri Nordik mengembangkan dan meriset pemodelan • Kemenkeu Irlandia, Korea, dan Inggris berkolaborasi dengan para pakar eksternal
Peningkatan kemampuan analisis	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkeu di Chili, Inggris, dan Finlandia melakukan penilaian dampak iklim • Model <i>GreenREFORM</i> Denmark dikembangkan dengan dukungan Kemenkeu

Catatan: yang **dicetak tebal** menunjukkan adanya studi kasus terperinci di dalam laporan lengkap.